

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan memerlukan anggaran yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pada waktu yang akan datang. Tercapainya realisasi atas anggaran dalam kementerian/Lembaga negara merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat saat ini karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari lembaga pemerintahan negara dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya. Untuk mengetahui kinerja dan ketaatan terhadap penggunaan APBN/APBD, Kementerian/Lembaga negara wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya yang dikenal dengan Laporan Realisasi Anggaran yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut PP No.71 Tahun 2010, Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk anggaran kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan keuangan secara bersamaan.

PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang didalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pernyataan standar ini mengatur pelaporan

realisasi anggaran entitas pelaporan secara tersanding sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan merupakan vertikal dari Ditjen Perbendaharaan yang melaksanakan kewenangan sebagai kuasa bendahara umum negara, yang menyalurkan dana yang berasal dari APBN kepada para satkernya, dan melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan peran pentingnya tersebut, laporan keuangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan menjadi output akhir yang penting dari proses akuntansi khususnya Laporan Realisasi Anggaran yang harus dianalisis untuk mengetahui pengelolaan sumber dana dan penyaluran kas sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2018 dan 2019 sebagai perbandingannya, sehingga penulis memilih judul **“Analisis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja periode 2018 dan 2019 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat berdasarkan laporan realisasi anggarannya.
2. Bagaimana pelaksanaan realisasi anggaran periode 2018 dan 2019 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana anggaran dan realisasi periode 2018 dan 2019, apakah anggaran sudah berjalan dengan baik atau belum.
2. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja periode 2018 dan 2019 pada Kanwil Diyjen Perbendaharaan Sumatera Barat.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah dengan cara magang di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) Padang Jl. Khatib Sulaiman No. 3, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan magang dilaksanakan selama lebih kurang 40 hari dimulai pada November 2020. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dan wawancara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah menerangkan tentang susunan dari penulisan ini sendiri yang dibuat secara teratur dan terperinci dan sistematika penulisan ini memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh. Sistematika dalam laporan terdiri dari 5 bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini akan menjelaskan mengenai latar belakang laporan yang akan di buat, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan landasan teori yang sehubungan dengan anggaran pemerintah meliputi perihal mencakup tentang anggaran, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penulisan tinjauan pustaka dilengkapi dengan sumber penulisannya.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bagian ini menjelaskan tentang profil Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) Padang. Bab ini menjelaskan bagaimana kegiatan dalam kantor ini dan bagaimana sejarah kantor secara umum.

BAB IV : URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bagian ini membahas tentang penjelasan pelaksanaan atas anggaran pendapatan dan belanja yang ada pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat berdasarkan laporan realisasi anggarannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.